

**MENILAI KINERJA *EFFICIENCY ANDEFFECTIVENESS* PELAKSANAAN
ANGGARAN
(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan (DPUBM-P))**

Raffael Addo Prahasta

Zfate666@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out how efficient and effective its budget in the implementation of program and activity. Besides, it also to find out what effort the department had in order to increase its efficiency and effectiveness. The research was qualitative. While, the data were both primary and secondary. In order to collect all the data which researcher needs, it was in the form of structured and un-structured interview to get primary. Meanwhile, for the secondary, it's in the form of Government Performance Accountability report and its performance report of Public Works Department of Highways and Drainage during 2015-2017. Moreover, the data analysis technique used triangulation (documentation and interview). The research result concluded the performance's efficiency of department had varied for each year. However, from the researcher's assessment, it showed the budget had implemented efficiently, with its efficiency less than 100%. Nevertheless, based on assesment's effectiveness of drainage had decreased. Furthermore, the objectives were to increase its effectiveness. Consequently, it would solve sparking and street problem sooner. Those efforts were namely making priority scale in planning and controlling, completing the instruments in land measurement, and owner estimate in its acquisition, and making own-management of sparking and street officers.

Key words: performance accountability, efficiency, effectiveness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, selain itu bertujuan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Dinas dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang bersumber dari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Laporan Kinerja (LKj) D-PUBMP Surabaya selama tahun 2015-2017. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk memperoleh data primer. Metode analisis dengan triangulasi data dari hasil dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja Dinas bervariasi setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa dalam penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas telah efisien, hal tersebut ditunjukkan dengan penghitungan rasio efisiensi kurang dari 100%. Meskipun demikian, berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan Dinas, data menunjukkan penurunan tingkat efektivitas dalam bidang pematusan, selain itu Dinas telah melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi permasalahan dalam meningkatkan efektivitas, yaitu membuat skala prioritas dalam bidang perancangan dan pengawasan, melengkapi perlengkapan untuk melakukan pengukuran tanah dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada bidang pengadaan tanah, pembuatan swakelola satgas pematusan dan satgas jalan agar permasalahan mengenai pematusan dan jalan dapat teratasi tanpa harus menunggu pihak ketiga.

Kata kunci: akuntabilitas kinerja, efisiensi, efektivitas

PENDAHULUAN

Sebagai perwujudan dari *good government* maka diperlukan adanya penegasan dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan, karena terjadinya penggeseran kewenangan sehingga pemerintah daerah

memiliki hak prerogatif, menyebabkan pemerintah daerah harus bertanggungjawab atas daerahnya sendiri, hal ini menyebabkan adanya peningkatan transfer dana publik yang berasal dari pemerintah pusat menuju pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk barang maupun jasa publik.

Jones dan Jerry (2010:508) menyatakan bahwa instansi sektor publik ditantang untuk terus menerus mengukur dan melaporkan efisiensi dan efektivitas secara konsistensebagaibentuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu sorotan publik terhadap bagaimana pemerintah daerah mengelola dana yang akan digunakan sebagai belanja daerah tertuju pada tingkat penyerapan belanja yang rendah dan juga ketidaktepatan alokasi belanja (DJPk, 2014). Kedua hal tersebut menjadi indikator yang merupakan tolok ukur utama dalam menilai kinerja belanja daerah.

Menurut Rhameswari (2016) bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bentuk akuntabilitas dan transparansi merupakan pelayanan yang dilakukan oleh SKPD untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Hasil kajian dari Komisi C DPRD (2017) menyatakan bahwa penyerapan anggaran pada SKPD di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih kurang maksimal, sehingga dapat dikatakan bahwa rendahnya kualitas belanja dan APBD tergambar dari porsi belanja tidak langsung serta rendahnya penyerapan belanja daerah.

Melitski dan Manoharan (2014:59) menyatakan bahwa integrasi dalam pelaporan kinerja berupa efisiensi dan efektivitas kedalam laporan anggaran online sebagai mekanisme transparansi untuk membangun kepercayaan publik dan secara internal berfungsi sebagai peningkat efektivitas pelayanan publik. Harapannya agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah daerah lebih akuntabel dan transparan dalam memaparkan pengalokasian anggaran untuk belanja daerah.

Prinsipnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kompilasi dari rencana yang telah dibuat dalam kegiatan anggaran pada setiap SKPD. Artinya, setiap SKPD memiliki peran yang krusial pada pelaksanaan rencana dan realisasi dari anggaran pemerintah daerah. Namun penelitian terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas masih sangat rendah dan terbatas pada kata ukuran sedangkan terdapat beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui instrumen pengukuran maka dari itu diperlukan penjelasan terperinci mengenai kejadian yang sebenarnya agar dapat memperoleh informasi yang nyata, riil (kebenaran yang sesungguhnya) dan objektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya dalam melaksanakan program dan kegiatannya?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi penyerapan anggaran belanja dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan (DPUBM-P) Kota Surabaya, (2) Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya.

TINJAUAN TEORETIS

Kualitas Belanja Daerah dan *Spending Performance*

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Permendagri No.13 tahun 2006 membagi belanja menjadi dua bagian yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan pengeluaran pemerintah yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan. Contoh dari belanja langsung adalah belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja pegawai.

Sedangkan, belanja tidak langsung dapat digambarkan sebagai pengeluaran untuk membayar hal-hal yang secara tidak langsung memiliki hubungan dengan program dan kegiatan pemerintah. Contohnya adalah belanja subsidi, belanja bunga, dan belanja tidak terduga.

Efisiensi Anggaran Belanja Langsung

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa efisiensi memiliki hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran pada tingkat efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan, terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Sehingga proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien, apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya, dan dana seminimal mungkin (*spending well*).

Kaho (1997) dalam Dima (2013) menyatakan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi anggaran: (1) Faktor kualitas SDM sebagai pelaku dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (2) Faktor keuangan sebagai tulang punggung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah; (3) Faktor sarana dan prasarana sebagai pendukung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah; dan (4) Faktor organisasi dan manajemen sebagai sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah. Sektor publik memiliki prinsip pelayanan untuk masyarakat tanpa memperhitungkan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari program dan kegiatan yang dilakukan. Harjowiryono (2011) menyatakan bahwa besarnya alokasi belanja pegawai akan mempengaruhi efisiensi belanja, terutama pada belanja langsung. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran belanja langsung menjadi kecil, yang akan berdampak pada minimnya program yang dapat dilaksanakan.

Efektivitas Anggaran Belanja Langsung

Menurut Mardiasmo (2009) menginterpretasikan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan suatu perbandingan antara target dan hasil yang telah tercapai, semakin mendekatinya antara target dan hasil yang dicapai maka semakin efektif suatu perencanaan. Berlandaskan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menunjukkan 5 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran juga berpengaruh pada efektivitas anggaran. Faktor-faktor tersebut ialah: (1) Dokumen Perencanaan, (2) Pencatatan Administrasi, (3) Kompetensi SDM, (4) Dokumen Pengadaan dan (5) Uang Persediaan (UP).

Rerangka Pemikiran

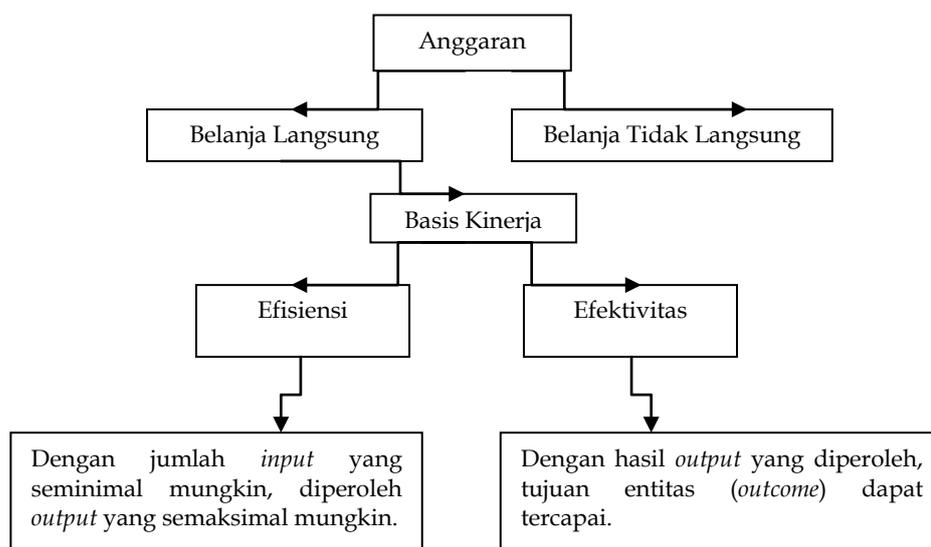
Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Terdapat dua jenis anggaran yang membedakan fungsi dari keduanya yaitu anggaran belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan anggaran belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah

yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan yang menjadi objek penelitian ini menggunakan pengukuran menurut Mahsun (2009) untuk mengukur kinerja digunakan pengukuran pada tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas. Makna dari efisiensi dibagi menjadi 2 macam yaitu secara ekonomis yang berarti bagaimana Dinas dapat meminimalisir biaya untuk memperoleh sumber daya yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, sedangkan secara teknis adalah bagaimana Dinas dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menghasilkan program dan kegiatan yang maksimal.

Makna dari efektivitas adalah bagaimana Dinas dapat mencapai program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan (*target*) yang telah ditetapkan saat perencanaan, dari kedua pengukuran tersebut maka pemerintah daerah dapat menghasilkan jumlah *output* yang maksimal dengan *input* seminimal mungkin dan *outcomes* sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pikir

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian, Gambaran Populasi, dan Objek (Situs) Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif sehingga memungkinkan sang peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang luas terhadap objek yang diteliti. Lebih lanjut, penelitian ini adalah penelitian eksploratoris yang bertujuan menggali dan menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan yang menjadi objek penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan bersumber dari data primer adalah wawancara dan data sekunder adalah dokumentasi. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan (DPUBM-P) di Surabaya. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data oleh peneliti untuk mengetahui dengan pasti mengenai informasi apa

yang akan diperoleh, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terarah yaitu wawancara dengan menggabungkan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur sehingga pembicaraan akan lebih fokus dan tetap membahas garis besar permasalahan. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek, sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat, catatan, foto, laporan dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang bagi peneliti untuk mengetahui hal yang pernah terjadi, data dapat tersimpan secara *online* maupun *offline*.

Di satu sisi, data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung yang disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBM-P) di Surabaya dalam rentang tahun 2015 s.d. 2017. Selanjutnya, data primer berupa wawancara di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBM-P), wawancara untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan serta tindakan yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja agar lebih efisien dan efektif. Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Dinas atau Perangkat Dinas yang bertanggung jawab terhadap program dan kegiatan Dinas, dengan demikian dapat diperoleh informan kunci.

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *one shot* atau *cross sectional* yaitu data hanya sekali dikumpulkan dalam satu periode (Sekaran, 2006). Lebih lanjut, penelitian ini adalah penelitian eksploratif yang bertujuan menggali dan menganalisa efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yang menjadi objek penelitian ini.

Satuan Kajian

Efisiensi Penyerapan Anggaran

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efisiensi memiliki hubungan erat dengan konsep produktifitas. Efisiensi memiliki dua jenis pengukuran yaitu teknis dan ekonomis, pengukuran efisiensi dari segi teknis dapat dilakukan melalui penyerapan anggaran, dengan membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung yang dihasilkan terhadap anggaran belanja yang digunakan (*cost of output*), sedangkan pengukuran efisiensi dari segi ekonomis dapat dilakukan melalui bagaimana entitas dapat meminimalisir *inputresource* yang digunakan yaitu menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan (pemborosan) karena hal ini dapat menyebabkan entitas menjadi tidak produktif. Penyerapan anggaran dapat dikatakan efisien apabila dalam realisasi anggaran belanja langsung mencapai 60%-80% dari anggaran belanja yang telah ditetapkan (*spending well*). Analisis Efisiensi Penyerapan Anggaran diukur dengan:

Efisiensi = $(\text{Realisasi Belanja}) / (\text{Anggaran Belanja}) \times 100\%$, berdasarkan pengukuran di atas digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk memahami tingkat efisiensi dan menangkap pemahaman narasumber mengenai makna dari efisiensi.

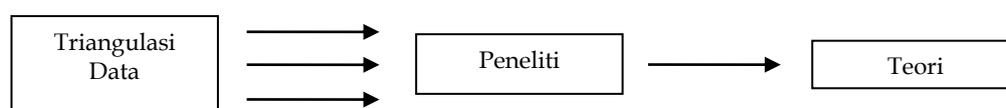
Efektivitas Penyerapan Anggaran

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa pada dasarnya efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas dalam penyerapan anggaran merupakan hubungan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan ketepatan alokasi anggaran belanja langsung yang harus dicapai. Penyerapan anggaran dikatakan efektif apabila proses alokasi anggaran telah mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan yang diharapkan (*spending wisely*). Pencapaian target atau tujuan akhir dapat dikatakan efektif jika dalam hasil akhir yang diharapkan target yang dicapai 90%-100% dari target anggaran yang telah ditetapkan/diharapkan.

Efektivitas Pencapaian Target/Sasaran Akhir yang diharapkan diukur dengan:

Efektivitas= (Realisasi Anggaran)/(Target Anggaran) \times 100%, berdasarkan pengukuran di atas digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk memahami tingkat efektivitas dan menangkap pemahaman narasumber mengenai makna dari efektivitas.

Format desain penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan verifikasi, dimana penelitian ini merupakan sebuah upaya pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian yang akan dilakukan. Format ini lebih banyak mengkonstruksi format penelitian dan strategi memperoleh data di lapangan, sehingga format penelitiannya menganut model induktif. Namun dalam hal memperlakukan teori, format kualitatif verifikasi lebih longgar dalam arti tetap terbuka pada teori, pengetahuan tentang data dan tidak mengharuskan peneliti menggunakan "kacamata" kuda. Alur informasi dalam penelitian kualitatif verifikasi ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2
Alur Informasi

Aliran ini menyatakan suatu hal yang tidak mungkin dicapai atau dapat melihat kebenaran apabila pengamat berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat dengan objek secara langsung. Oleh karena itu, hubungan antara pengamat dengan objek harus bersifat interaktif, dengan catatan bahwa pengamat harus bersifat senetral mungkin, sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurangi secara minimal.

Analisis data kualitatif melalui data empiris berupa kumpulan data yang berisi kata-kata dan beberapa rangkaian angka yang diperoleh melalui data sekunder yaitu Laporan Kinerja (LAKIP). Menurut Mahsun (2009), untuk mengukur tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan antara *input* dan *output*. Input secara teori adalah realisasi anggaran untuk memperoleh pendapatan, biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi Belanja Langsung (dana yang diperoleh dari APBD sebelum digunakan untuk belanja kekinisan). *Output* secara teori adalah realisasi pendapatan, pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi Anggaran Belanja yang teralokasi dari APBD. Beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi efisiensi anggaran belanja langsung, yaitu: (1) Keterbatasan Pejabat Pengadaan yang Bersertifikat; (2) Perubahan Kebijakan Pemerintah; (3) Perbedaan antara Anggaran yang Diusulkan dan yang Disetujui; (4) SDM Pelaksana yang Kurang Berkompeten; (5) Kesulitan dalam Menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); (6) Porsi Belanja Pegawai Tidak Langsung yang Terlalu Besar; (7) Perencanaan Kegiatan Tidak Sesuai Kebutuhan; (8) Anggaran Kegiatan Diblokir/Tanda Bintang Karena Belum Adanya Data Pendukung; (9) Keterlambatan Pengesahan Anggaran; (10) Masa Penyusunan dan Penelaahan Anggaran Terlalu Pendek.

Selain faktor yang mempengaruhi efisiensi terdapat faktor yang paling sering mempengaruhi efektivitas anggaran belanja langsung, yaitu: (1) Partisipasi Penyusunan Anggaran; (2) Proses Pembahasan Anggaran di DPRD; (3) Perbedaan antara Anggaran yang Diusulkan dan yang Disetujui; (4) Ketersediaan Dana Uang Persediaan (UP); (5) SDM Kurang Berkompeten; (6) Insentif Bagi Pejabat Pengadaan yang Tidak Sesuai; (7) Keterlambatan Administratif; (8) Kerumitan dalam Proses Persiapan Anggaran; (9) Tingkat Pencairan Anggaran yang Lebih Rendah; (10) Kurangnya Sosialisasi Peraturan Baru. Berdasarkan fase anggaran dibagi menjadi 4 tahap yaitu: (1) Dimensi Perencanaan; (2) Dimensi Administratif; (3) Dimensi Pelaksanaan; dan (4) Dimensi Sumber Daya Manusia.

Dari pengukuran di atas yaitu efisiensi dan efektivitas hanyalah menjadi acuan peneliti dalam merepresentasikan tingkatan efisiensi dan efektivitas ke dalam bentuk persentase, namun jika ditemukan hal lain yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan maka data tersebut akan diikutsertakan ke dalam pembahasan untuk menjadi informasi tambahan mengenai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan, karena efisiensi dan efektivitas tidak hanya dapat diukur tetapi juga dapat dinilai sehingga data yang disajikan tidak hanya data dalam bentuk persentase nominal namun juga hal-hal yang bersifat narasi deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan merupakan instansi dengan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum, perancangan dan pengawasan jalan serta jembatan, pengadaan tanah dan pemanfaatannya, perbaikan dan pengawasan pematuan. Secara umum dinas harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang tersebut, namun tidak sedikit kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan dalam meningkatkan kinerja pelayanan agar menjadi lebih efisien dan efektif untuk setiap pelaksanaan dan kegiatan pada setiap bidang, hal tersebut merupakan penyebab kinerja dinas menjadi tidak maksimal.

Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan telah mengatasi beberapa kendala yang dihadapi meskipun belum menyeluruh namun hal tersebut telah membantu peningkatan hasil kinerja dinas secara perlahan. Harapan masyarakat terhadap kinerja dinas dapat diidentifikasi dari: (1) Tersedianya lahan untuk pembangunan demi kepentingan umum; (2) Adanya sistem drainase kota yang terpadu, sehingga mengurangi banyaknya genangan air yang diukur berdasarkan lama, luas, dan tingginya; (3) Jaringan jalan yang baik tidak berlubang dan tidak ada genangan air; (4) Kualitas sistem jaringan dan layanan air bersih yang tinggi; (5) Pelayanan masyarakat yang sigap, ramah, dan tepat.

Menilai Kinerja Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Dinas

Efisiensi sebagai gambaran kinerja Dinas melalui perbandingan antara Realisasi Anggaran yang digunakan untuk belanja operasional dengan Total Anggaran Belanja, untuk menilai kinerja efisiensi akan ditunjukkan dengan rasio efisiensi.

Menurut Mahsun (2009) dalam Sumenge A.S (2013) tingkat efisiensi dapat dihitung dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rasio tersebut dapat diketahui besaran efisiensi dari tahun 2015 s/d 2017 yang terdapat pada tabel 3, tabel 5, dan tabel 9. hasil perhitungan dalam mengukur tingkat efisiensi Pelaksanaan Anggaran dapat dibagi menjadi beberapa kriteria berikut:

Tabel 1
Persentase Efisiensi

No	Persentase Efisiensi	Keterangan
1	Lebih dari 100%	Tidak Efisien
2	Sama dengan 100%	Efisien Berimbang
3	Kurang dari 100%	Sangat Efisien

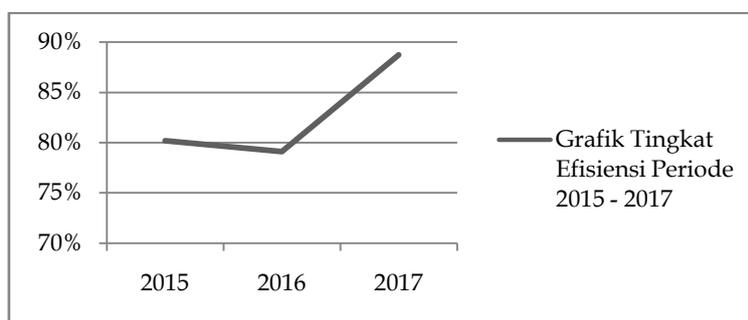
Sumber : Data Sekunder (Diolah, 2019)

Tabel 2
Realisasi Anggaran Tahun 2015-2017

2015			2016			2017		
Realisasi Anggaran	Anggaran Belanja	%Efisiensi	Realisasi Anggaran	Anggaran Belanja	%Efisiensi	Realisasi Anggaran	Anggaran Belanja	%Efisiensi
Rp. 1.109.569.11	Rp. 1.383.536.23	80,20%	Rp. 1.033.720.42	Rp. 1.306.617.86	79,11%	Rp. 978.715.93	Rp. 1.102.952.23	88,73%
4.187	0.067		9.361	2.728		6.887	9.925	

Sumber : Data Sekunder (Diolah, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas yang merupakan data Realisasi Belanja Langsung pada periode tahun 2015 s/d 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, berikut kesimpulan melalui grafik untuk menggambarkan tingkat efisiensi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya tahun 2015 s/d 2017:



Sumber: Data Sekunder (Diolah, 2019)

Gambar 3
Perkembangan Tingkat Efisiensi Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Adanya perbedaan tingkat efisiensi pada periode 2015 s/d 2017 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah Dinas harus menetapkan beberapa Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (TSPK) sebagai acuan dalam membuat skala prioritas agar sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Kepala Dinas, namun perbedaan yang terjadi dikarenakan kurangnya anggaran di tahun 2016 menyebabkan beberapa program kegiatan Dinas tidak dapat berjalan dengan baik, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaho (1997) dalam Dima (2013) bahwa faktor keuangan merupakan tulang punggung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah.

Faktor selanjutnya adalah terkait dengan pengadaan tanah, Dinas bekerja sama dengan pihak ketiga namun seringkali menemukan kendala dikarenakan fasilitas yang digunakan oleh pihak ketiga tersebut kurang memadai, hal ini menyebabkan terlambatnya penyerahan berkas pengukuran tanah dan administrasi sehingga kinerja Dinas juga ikut terhambat, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto (2012) tentang dokumen pengadaan yaitu kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS). Selain itu perbedaan efisiensi disetiap tahun dikarenakan berkembangnya kegiatan dalam satu indikator *multiyears* sehingga anggaran yang diperlukan juga ikut meningkat, seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2009) mengenai konsep produktifitas yaitu pengukuran pada tingkat efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan, terhadap input yang digunakan (*cost of output*).

Menilai Kinerja Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Dinas

Efektivitas adalah gambaran kemampuan Dinas dalam merealisasikan Anggaran Belanja yang telah ditetapkan dan membandingkan dengan target atau sasaran yang ingin dicapai, untuk menilai kinerja efektivitas akan ditunjukkan dengan rasio efektivitas.

Menurut Mahsun (2009) dalam Sumenge A.S (2013) tingkat efektivitas dapat diukur dengan:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Hasil}}{\text{Target yang Ingin Dicapai}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rasio tersebut dapat diketahui besaran efektivitas dari tahun 2015 s/d 2017 yang terdapat pada tabel 2, tabel 4, dan tabel 8. hasil perhitungan dalam mengukur tingkat efisiensi Pelaksanaan Anggaran dapat dibagi menjadi beberapa kriteria berikut:

Tabel 3
Persentase Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Keterangan
1	Lebih dari 100%	Sangat Efektif
2	Sama dengan 100%	Efektif
3	99%-90%	Cukup Efektif
4	89%-75%	Kurang Efektif
5	Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber : Data Sekunder (Diolah, 2019)

Efektivitas penyerapan anggaran pada tahun 2015 adalah:

$(\text{Realisasi hasil}) / (\text{Target yang ingin dicapai}) \times 100\%$, berdasarkan data tabel 4 (lampiran) yang telah diolah dinyatakan sebagai berikut: (1) Luas wilayah genangan: $100\% - ((1270,55\text{Ha}/2027\text{Ha}) \times 100\%) + 100\% = 137,32\%$, persentase penurunan luas wilayah genangan sebesar 137,32% atau sebesar 1270,55 Ha menunjukkan bahwa efektivitas dalam memperkecil luas wilayah genangan telah melampaui target yang diharapkan, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan dari SH selaku Ketua Bidang Pematusan menyatakan bahwa Dinas telah melakukan beberapa tindakan yaitu dengan meningkatkan kapasitas dari tampungan pada setiap saluran, adanya perencanaan pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase pada setiap rayon secara terpadu dan berkelanjutan, perbaikan konektivitas dan infrastruktur sistem drainase dari primer hingga tersier, melakukan penyuluhan di beberapa daerah yang rawan mengalami banjir guna mengurangi penyebab dari banjir yang diakibatkan ulah masyarakat. (2) Lama terjadinya genangan: $100\% - ((53,38 \text{ menit}/60 \text{ menit}) \times 100\%) + 100\% = 111,03\%$, persentase penurunan lama terjadinya genangan sebesar 111,03% atau sebesar 53,38 menit menunjukkan bahwa efektivitas dalam memperkecil durasi lama wilayah genangan telah melampaui target yang diharapkan, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan SH selaku Ketua Bidang Pematusan menyatakan bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan telah melakukan tindakan dalam peningkatan efektivitasnya berupa pembentukan indikator sebagai tolok ukur yaitu lama. Dinas telah melakukan sosialisasi secara intensif terhadap warga agar tidak membuang sampah di sungai dengan hal ini maka sedimentasi pada saluran dapat berkurang, serta mengembalikan kapasitas dan elevasi saluran melalui pengerukan sungai. (3) Rata-rata tinggi genangan: $100\% - ((16,40 \text{ cm}/20 \text{ cm}) \times 100\%) + 100\% = 118\%$, persentase penurunan rata-rata tinggi genangan sebesar 118% atau 16,40 cm menunjukkan bahwa efektivitas dalam menurunkan rata-rata tinggi genangan telah melampaui target yang diharapkan, hasil tersebut diperkuat SH selaku Ketua Bidang Pematusan dalam Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menyatakan bahwa Dinas telah melakukan tindakan untuk meningkatkan efektivitasnya berupa pembentukan indikator sebagai tolok ukur yaitu tinggi.

Tindakan yang dilakukan Dinas untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan penambahan *boezem/waduk* pada daerah hulu dan hilir, mengoptimalkan penggunaan Pintu Air, dan *Mechanical Screen*, penambahan beberapa rumah pompa baru serta meningkatkan kapasitas pompa yang telah dimiliki, pembangunan saluran baru agar memperluas daerah resapan. (4) Lama jam sibuk: $100\% - ((382 \text{ menit}/382 \text{ menit}) \times 100\%) + 100\% = 100\%$, persentase pencapaian lama jam sibuk sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat dinyatakan telah dilakukan secara efektif, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan GSP selaku Ketua Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menyatakan bahwa solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam bidang terkait adalah dengan pengurangan hambatan di sisi kiri dan kanan jalan yaitu penggusuran para pedagang kaki lima yang tidak memiliki ijin untuk mendirikan *stand*, mengoptimalkan pembangunan jembatan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran dan *frontage road* untuk mengurangi kemacetan serta menambah sarana transportasi jalan untuk daerah disekitarnya, dengan adanya swakelola satgas pemeliharaan jalan maka Dinas dapat dengan segera menyelesaikan perbaikan dan penambalan jalan dengan cepat tanpa harus menunggu adanya pihak ketiga, dengan memprioritaskan pelebaran jalan dapat mengurangi kemacetan di beberapa wilayah, dengan memperbaharui beberapa rambu lalu lintas dan lampu merah di beberapa titik rawan macet, pengembalian fungsi trotoar/*pedestrian*, dan penambahan beberapa saluran tepi untuk mencegah genangan air yang dapat merusak jalan dan mengakibatkan kecelakaan. (5) Kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana pemukiman: $(440 \text{ lokasi}/425 \text{ lokasi}) \times 100\% = 103,53\%$, persentase peningkatan kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana pemukiman sebesar 103,53% atau 440 lokasi menunjukkan bahwa efektivitas dalam pencapaian telah melampaui target yang ditetapkan, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan AY selaku Ketua Bidang Keuangan menyatakan bahwa solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi adalah dengan peningkatan sentra Usaha Kecil Menengah (UKM) yang lebih banyak dalam produksi pembuatan *paving*, peningkatan program pavingisasi di seluruh wilayah Surabaya secara merata dan juga mengajak masyarakat berpartisipasi untuk mendukung program tersebut, beberapa metode kerja pavingisasi juga bisa diaplikasikan untuk gang-gang kecil di dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pavingisasi.

Efektivitas penyerapan anggaran pada tahun 2016 adalah:

$(\text{Realisasi hasil})/(\text{Target yang ingin dicapai}) \times 100\%$, berdasarkan data tabel 4 (lampiran) yang telah diolah dinyatakan sebagai berikut: (1) Luas Tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan kepentingan umum: $(17.563/30.864) \times 100\% = 56,9\%$, persentase realisasi tanah yang berhasil dibebaskan untuk kepentingan umum sebesar 56,9% atau 17,563 m² sehingga dapat dikatakan kurang efektif karena target yang diharapkan tidak tercapai, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan INH selaku Ketua Bidang Pengadaan Tanah menyatakan bahwa untuk mengatasi kendala yang dihadapi Dinas adalah dengan adanya target, sasaran, program dan kegiatan (TSPK) Dinas berusaha untuk membuat skala prioritas yang lebih mengutamakan pengadaan jalan sehingga proses administrasi dan kelengkapan pembayaran dapat diatasi, proses indentifikasi terhambat disebabkan oleh keterlibatan beberapa pihak yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pengadilan Negeri sebagai *appraisal* yang melakukan proses identifikasi, pembuatan peta bidang yang seringkali mengalami kendala dikarenakan fasilitas yang dimiliki tidak memadai sehingga proses pengadaan tanah yang dilakukan Dinas juga tidak dapat berjalan dengan baik oleh sebab itu Dinas membuat swakelola khusus dengan fasilitas yang memadai sehingga proses pengadaan tidak harus menunggu pihak ketiga. (2) Tingkat genangan: $100\% - ((41,95/30,7) \times 100\%) + 100\% = 60,36\%$, persentase kenaikan tingkat genangan tahun 2016 menjadi 60,36% atau sebesar 41,95 menunjukkan bahwa program dan kegiatan dalam memperkecil tingkat

genangan tidak efektif sehingga target yang diharapkan tidak terpenuhi, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan SH selaku Ketua Bidang Pematuan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Dinas adalah dengan mengkaji kembali titik pantauan genangan di setiap titik, penyelesaian *Box Culvert* di Banyu Urip, adanya koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo terkait perbaikan dan memperkuat tanggul Kali Lamong, membuat penyesuaian terhadap jadwal pemeliharaan pompa banjir untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang tidak menentu, penambahan kapasitas pompa secara bertahap untuk mengurangi wilayah banjir di Surabaya, perbaikan konektivitas dan infrastruktur sistem drainase dari primer hingga tersier, pengoptimalan lahan luas sebagai daerah resapan banjir, sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat. (3) Penambahan jalan baru: $(2.382 \text{ m}/1000 \text{ m}) \times 100\% = 238,2\%$, persentase peningkatan dalam penyediaan dan peningkatan kinerja jaringan jalan sebesar 238,2% atau 16,40 cm menunjukkan bahwa efektivitas dalam menurunkan rata-rata tinggi genangan telah melampaui target yang diharapkan, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan GSP selaku Ketua Bidang Jalan dan Jembatan menyatakan bahwa Dinas telah melakukan beberapa tindakan diantaranya adalah dengan menjalin koordinasi yang baik dengan beberapa instansi terkait agar proses administrasi dapat terselesaikan tepat waktu, Dinas juga melakukan beberapa tindakan antisipatif berupa pemindahan utilitas yang memiliki koordinasi dalam pelaksanaannya di lapangan, selain itu Dinas juga memonitoring dan mengevaluasi terkait anggaran agar dapat teralokasikan dengan baik dan merata. (4) Jalan dalam kondisi baik: $(1.662.998,50 \text{ m}^2/1.686.380,54) \times 100\% = 98,61\%$, persentase pencapaian jalan dalam kondisi baik sebesar 98,61% hampir mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat dinyatakan telah dilakukan secara efektif, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan GSP selaku Ketua Bidang Jalan dan Jembatan adalah dengan menyiapkan beberapa Sumber Daya Manusia yang memadai secara kuantitas maupun kualitas, mengatur jadwal perbaikan dengan baik sehingga pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal dan kondisi lapangan. (5) Penyediaan prasarana pejalan kaki: $(10.773,33 \text{ m}^2/38.167,9 \text{ m}^2) \times 100\% = 28,23\%$, persentase penyediaan prasarana pejalan kaki sebesar 28,23% atau 10.773,33 m² jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi penurunan sehingga untuk mencapai target yang diharapkan, kegiatan dan program Dinas kurang efektif, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan GSP selaku Ketua Bidang Jalan dan Jembatan adalah dengan mengatur kembali jadwal pelaksanaan dengan baik dan melaksanakan sesuai jadwal, adanya koordinasi terkait permasalahan utilitas di lapangan, dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa memberikan kontribusi dana bagi pembangunan infrastruktur dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). (6) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan permukiman layak huni dengan kelengkapan sarana prasarana dan sistem sanitasi secara berkelanjutan: $(1.652.830 \text{ m}^2/325.210.000 \text{ m}^2) \times 100\% = 0,51\%$, persentase kawasan yang terlayani sebesar 0,51% atau 1.652.830 m² menunjukkan bahwa program dan kegiatan ini tidak efektif karena jauh dari target yang diharapkan.

Data mengenai efektivitas menunjukkan bahwa di tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan cukup efisien dalam penyerapan anggaran meskipun belum maksimal di angka 100%, namun dari segi efektivitas Dinas tersebut berada dibawah target yang diharapkan yaitu: (1) Segi luas tanah yang disediakan bagi kepentingan umum tidak mencapai target yang diharapkan karena kelengkapan pembayaran yang belum sesuai dengan administrasi, proses *appraisal* oleh jajaran samping dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan yaitu Pengadilan Negeri dan BPN yang terlambat sehingga menghambat proses pembuatan peta bidang. (2) Segi tingkat genangan tidak mencapai target yang diharapkan hal ini disebabkan tingkat curah hujan pada tahun 2016 yang sangat tinggi, pekerjaan saluran yang belum tuntas, serta banjir kiriman dari luapan sungai Bengawan Solo yang menyebabkan jebolnya tanggul Kali Lamong. (3) Segi penambahan

jalan baru tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan terlambatnya proses pembebasan lahan yang terkendala proses administrasi tidak sesuai syarat, kendala pembangunan di lapangan karena pemindahan sarana utilitas membutuhkan koordinasi terlebih dahulu. (4) Segi penyediaan prasarana pejalan kaki tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena jadwal pelaksanaan yang tidak tepat waktu, kendala pemindahan utilitas, serta kurangnya anggaran dikarenakan skala prioritas yang harus didahulukan oleh Dinas.

Efektivitas penyerapan anggaran pada tahun 2017 adalah:

(Realisasi hasil)/(Target yang ingin dicapai) x 100%, berdasarkan data tabel 4 (lampiran) yang telah diolah dinyatakan sebagai berikut: (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota: $100\% - ((25,00/26,44) \times 100\%) + 100\% = 105,45\%$, persentase tingkat genangan sebesar 105,45% atau 25,00 sehingga dapat dikatakan efektif karena telah melampaui target yang diharapkan, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan SH selaku Ketua Bidang Pematuan menyatakan bahwa beberapa tindakan yang dilakukan Dinas untuk mengatasi permasalahan pada Dinas adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait fisik, melakukan beberapa pelatihan yang intensif guna memperoleh SDM Operator yang berkualitas, meningkatkan koordinasi pada bagian perencanaan awal untuk *Detail Engineering Design* (DED) dan bagian yang merealisasikan pembangunan, dan yang terakhir dengan menambah SDM untuk bagian Surveyor dan Verifikator perencanaan serta melakukan koordinasi dengan beberapa pimpinan dalam menghadapi beberapa perubahan/penyesuaian desain rencana sehingga dapat berjalan sesuai dengan arahan dan kebijakan yang berlaku. (2) Pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan: $(1.667.870,71 \text{ m}^2/1.689.289,60) \times 100 = 98,73\%$, persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 98,73% atau 1.667.870,71 m² menunjukkan bahwa program dan kegiatan dalam pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan sudah efektif sehingga target yang diharapkan terpenuhi, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan GSP selaku Ketua Bidang Jalan dan Jembatan menyatakan bahwa beberapa permasalahan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi pada pihak fisik agar program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan, pelatihan terhadap SDM Operator untuk meningkatkan kualitas individu, percepatan penyediaan lahan sebagai prioritas utama Dinas, penambahan SDM sebagai pengawas di lapangan, melakukan beberapa koordinasi dengan pimpinan terkait ketidaksesuaian anggaran kegiatan, penambahan SDM (surveyor dan verifikator perencanaan) serta melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait perubahan/penyesuaian agar sesuai dengan rencana dan arahan. (3) Pembangunan jaringan air bersih perkotaan: tidak terdapat realisasi pelaksanaan karena pelaksanaan harus melalui PDAM sesuai rekomendasi DPRD. (4) Pengelolaan dan peningkatan utilitas kota: $(27 \text{ ijin}/27 \text{ ijin}) \times 100\% = 100\%$, persentase pengelolaan dan peningkatan utilitas kota sebesar 100% atau 27 ijin telah dilakukan pemasangan kabel utilitas dan fiber optik sehingga program dan kegiatan ini dapat dinyatakan telah dilakukan secara efektif, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan AY selaku Ketua Bidang Keuangan menyatakan bahwa Dinas melakukan penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan *appraisal* sewa lahan ijin untuk penempatan utilitas agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). (5) Pengadaan tanah: $(61.773 \text{ m}^2/30.617 \text{ m}^2) \times 100\% = 201,76\%$, persentase pengadaan tanah sebesar 201,76% atau 61.773 m² dapat dikatakan bahwa program pengadaan tanah efektif karena telah melampaui target yang ditetapkan, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan INH selaku Ketua bidang Pengadaan Tanah memiliki solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas yaitu dengan meningkatkan koordinasi pada pihak terkait (baik warga maupun pemerintah pusat/provinsi) serta memprioritaskan pengadaan lahan yang akan dilaksanakan pembangunan sesuai anggaran yang tersedia. (6) Perencanaan pembangunan daerah: $(9 \text{ dokumen}/9 \text{ dokumen}) \times 100\% = 100\%$, persentase perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% atau 9 dokumen telah terselesaikan, hal inimenunjukkan bahwa

program dan kegiatan berjalan efektif karena mencapai target yang diharapkan, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan RNW selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Pengawasan menyatakan bahwa solusi yang dilakukan Dinas untuk mengatasi permasalahan dalam bidang terkait adalah dengan mengadakan bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen agar lebih memiliki pemahaman yang mendalam. (7) Pelayanan administrasi perkantoran: $(81,30\%/72\%) \times 100\% = 112,92\%$, persentase kepuasan pegawai dinas terhadap pelayanan administrasi perkantoran sebesar 112,92%, hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan untuk meningkatkan kepuasan pegawai efektif karena telah melampaui target yang ditetapkan, hasil tersebut diperkuat dengan pernyataan RNW selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Pengawasan menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam bidang terkait maka tindakan yang harus dilakukan Dinas adalah melakukan evaluasi kembali mengenai perencanaan agar penyediaan barang dan jasa lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

Data mengenai efektivitas menunjukkan bahwa di tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan cukup efisien dalam penyerapan anggaran meskipun belum maksimal di angka 100%, namun dari segi efektivitas Dinas tersebut telah mencapai target yang diharapkan karena pada tahun 2015 dan 2016 Dinas telah menjalankan program *multi-years* sehingga sumber daya yang dibutuhkan untuk program dan kegiatan yang dilakukan di tahun 2017 telah terpenuhi dan siap untuk digunakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan tentang Menilai Kinerja Efficiency dan Effectiveness Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2015 s/d 2017:

Tingkat efisiensi kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan telah berjalan secara efisien berdasarkan perhitungan rasio efisiensi namun menunjukkan beberapa hasil yang bervariasi dikarenakan terdapat perubahan indikator program di setiap tahunnya, selain itu juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya tingkat efisiensi kinerja yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang *multi years projects* hal ini mengharuskan Dinas untuk membuat prioritas dalam menjalankan program kegiatan dikarenakan seluruh program tersebut merupakan perencanaan jangka panjang, selain hal tersebut Dinas juga memiliki beberapa kendala dalam menjalankan beberapa program kegiatan yaitu Dinas seringkali kekurangan anggaran, kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri saat menjalankan program pengadaan tanah, dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan sudah efisien namun dikarenakan kurangnya anggaran dan Dinas memprioritaskan pengadaan tanah ketimbang program kegiatan yang lainnya.

Tingkat efektivitas kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan dapat dilihat bahwa Dinas cukup efektif dalam menjalankan beberapa program dan kegiatan di tahun 2015, namun terdapat penurunan kinerja di tahun 2016 yaitu kurangnya luas tanah serta bangunan yang akan digunakan untuk pembangunan, meningkatnya genangan dikarenakan curah hujan yang tinggi pada tahun tersebut, penyediaan prasarana jalan kaki yang kurang karena tidak memiliki cukup lahan untuk dibangun, minimnya pemukiman layak huni namun hal tersebut secara perlahan mulai diperbaiki Dinas di tahun berikutnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Dinas telah meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah mereka rencanakan. Sedangkan di tahun 2017 Dinas dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi di tahun-tahun sebelumnya dan dapat meningkatkan efektivitas kerjanya menjadi lebih optimal; (3) Beberapa tindakan yang dilakukan Dinas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

dalam setiap bidangnya yaitu: (a) Bidang Perancangan dan Pengawasan yaitu dengan membuat skala prioritas yang bertujuan untuk mengutamakan beberapa program dan kegiatan yang nantinya akan menjadi *multi-years projects*; (b) Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Dinas melengkapi beberapa fasilitas yang mereka miliki untuk melakukan pengukuran tanah, dan juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS); (c) Bidang Pematuan yaitu Dinas menciptakan beberapa swakelola di bidang satgas pematuan yang dilengkapi dengan peralatan sendiri serta dikerahkan selama 24 jam sehingga permasalahan mengenai pematuan dapat diatasi sesegera mungkin; (d) Bidang Jalan dan Jembatan yaitu Dinas juga membuat swakelola satgas jalan dengan perlengkapan milik Dinas, selain itu juga berkerja sama dengan Radio Suara Surabaya, mengadakan fasilitas Call Center agar masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dan mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan pematuan dan jalan via *telephone*, dan juga penyuluhan terhadap kelurahan dan kecamatan Kota Surabaya agar memberikan laporan mengenai keluhan masyarakat terkait jalan dan pematuan setiap bulannya; (e) Yang terakhir adalah Sistem Kerja konvensional yang digunakan dalam Dinas telah diganti menjadi sistem kerja yang serba elektronik, hal ini dilakukan karena sistem konvensional yang cenderung menambah limbah sampah kertas, selain itu hal ini dilakukan untuk mempermudah kinerja dari setiap anggota Dinas.

Saran

Berdasarkan beberapa temuan tersebut maka diharapkan Pemerintah Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan dapat memperbaiki sistem pengajuan anggaran dikarenakan seringkali permasalahan yang dihadapi Dinas adalah kurangnya anggaran yang dapat dialokasikan pada program yang telah menjadi prioritas dalam *multi-years projects*. Selain itu, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) swakelola dalam bidang pengadaan tanah dan pematuan juga perlu diperhatikan karena pekerjaan Dinas seringkali terhambat karena adanya keterlambatan dari pihak ketiga, peningkatan fasilitas dalam memprediksi curah hujan sangat diperlukan untuk mencegah permasalahan yang sama seperti tahun 2016. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif sehingga terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini di antaranya adalah: (1) Penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara secara mendalam sehingga terdapat kemungkinan bahwa jawaban-jawaban yang diperoleh tidak terlalu terperinci dalam setiap bidang yang terdapat di Dinas; (2) Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga tidak dapat menarik kesimpulan umum atau generalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dima, E. (2013). Analisis efisiensi belanja langsung pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(1):30-35.
- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan (DPUBM-P). (2015). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya 2015*. Surabaya.
- _____. (2016). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya 2016*. Surabaya.
- _____. (2017). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya 2017*. Surabaya.
- Harjowiryo, M. (2011). *Deskripsi dan analisis APBD 2011*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Jones, L. R. (2010). *Performance Budgeting In The U.S. Federal Government History, Status And Future Implications*. *Public Finance and Management*, 10(3): 508-513.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Laporan pelaksanaan spending performance dalam mendanai pelayan publik*. <http://djpk.kemenkeu.go.id/ebook/publikasi/book/39-laporan-pelaksanaan-spending-performance-dalam-mendanai-pelayanan-publik/4-publikasi>. Diakses tanggal 26 April 2019.
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPF. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi. Yogyakarta.

- Melitski, J. (2014). *Performance Measurement, Accountability, And Transparency of Budgets And Financial Reports*. PAQ SPRING, 59-62.
- Nurwawati, R.(2016). “APBD Kota Surabaya 2017 Digatedok, ternyata Tiga SKPD ini Penyedot Anggaran Terbesar”. <http://surabaya.tribunnews.com/2016/12/02/apbd-kota-surabaya-2017-digatedok-ternyata-tiga-skpd-ini-penyedot-anggaran-terbesar>. Diakses tanggal 26 April 2019.
- Rhameswari, A. (2016). *Pengaruh Kualitas Layanan Dan Reputasi Terhadap Kepercayaan Serta Dampaknya Pada Komitmen Partner Kerja (Studi Pada Layanan Perbendaharaan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*.Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank, 610.
- Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Jakarta.
- Sumenge, AS. (2013). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan, *Jurnal EMBA*, 1(3):74-81
- Sunaryo, A. (2006). Pengaruh variabel-variabel karakteristik anggaran Terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*. Surabaya.
- World Bank, (2012).*Identifikasi hambatan dalam pelaksanaan anggaran di sektor infrastruktur di Jakarta*. Dapat diakses pada www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2018/04/28/000333038_20120608044815/Rendered/PDF/696600_BAHASA0W0.
- Tiebout, CM. (1956). A pure theory of local.*Journal of Political Economy*, 64 (1): 416-424.

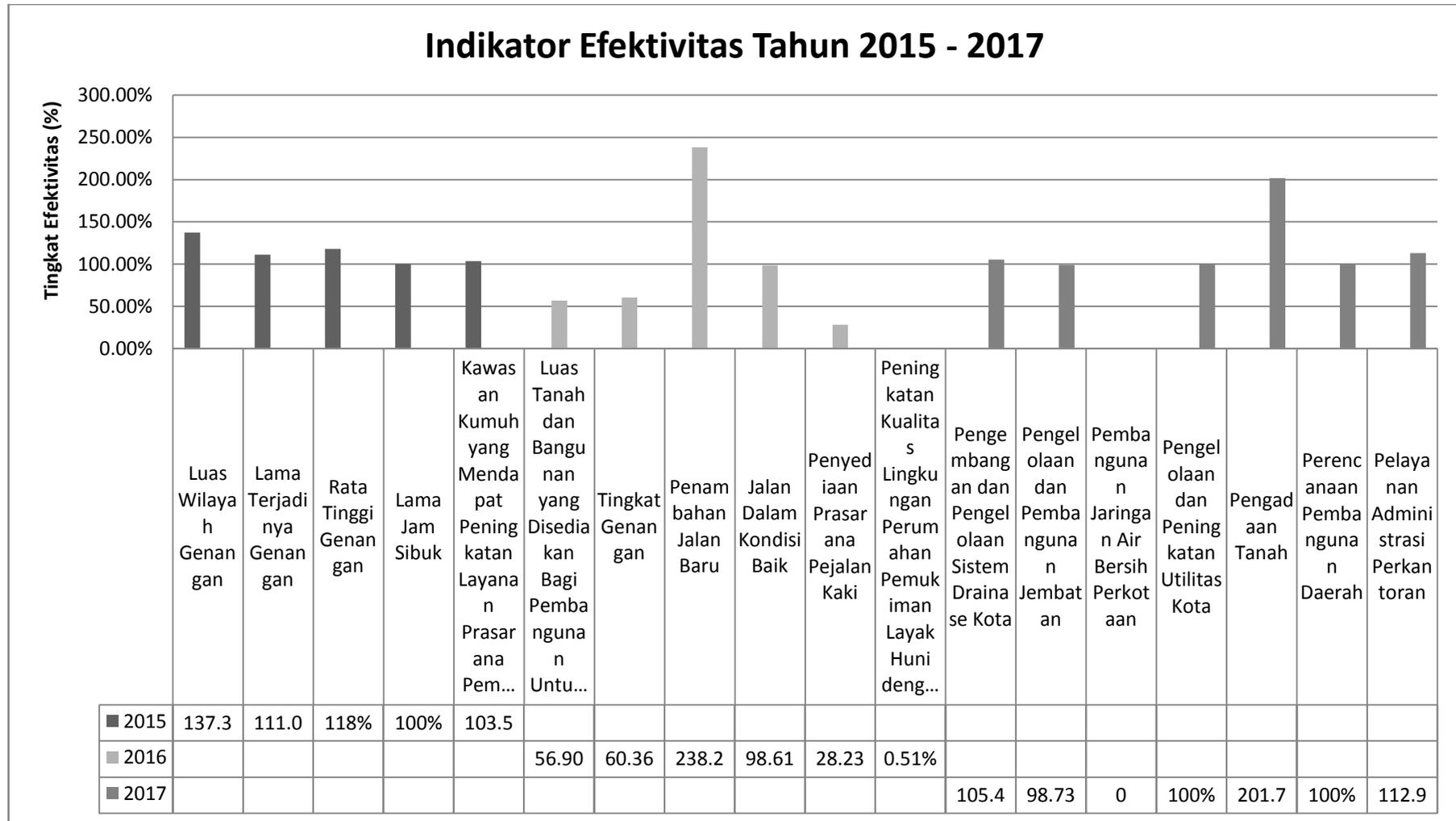
Tabel 4
Indikator Realisasi Tahun 2015-2017

Tahun	2015			2016			2017		
Indikator	Realisasi	Target	%Efektivitas	Realisasi	Target	%Efektivitas	Realisasi	Target	%Efektivitas
Luas Wilayah Genangan Lama	1.270,55 Ha	2.027 Ha	137,32%						
Terjadinya Genangan Rata Tinggi	53,38 menit	60 menit	111,03%						
Lama Sibuk Kawasan Kumuh yang Mendapat Peningkatan Layanan Prasarana Pemukiman	16,40 cm	20 cm	118%						
Luas Tanah dan Bangunan yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tingkat Genangan	382 menit	382 menit	100%	17.563 m ²	30.864 m ²	56,9%			
	440 Lokasi	425 Lokasi	103,53%	41,95	30,7	60,36%			

Penambahan Jalan Baru	2.382 m	1.000 m	238,2%	
Jalan Dalam Kondisi Baik	1.662.998,50 m ²	1.686.380,54 m ²	98,61%	
Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki	10.773,33 m ²	38.167,9 m ²	28,23%	
Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan	1.652.830 m ²	325.210.000 m ²	0,51%	
Pemukiman Layak Huni dengan Kelengkapan Sarana Prasarana dan Sistem Sanitasi Secara Berkelanjutan				
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota				
Pengelolaan dan Pembangunan Jembatan				
Pembangunan				
		25,00	26,44	105,45%
		1.667.870,71 m ²	1.689.289,60 m ²	98,73%

Jaringan Air Bersih Perkotaan	—	—	—
Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	27 Ijin	27 Ijin	100%
Pengadaan Tanah	61.773 m ²	30.617 m ²	201,76%
Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	81,30%	72%	112,92%

Sumber : Data Penelitian yang Diolah



Sumber : Data Penelitian yang Diolah

Gambar 4